

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (1945).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021).
- Ave Ceriti Sinjal, S. S. (2018). IPTEKS PENYUSUNAN ATAU PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL WAJIB PAJAK. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*.
- Ben Langford, T. O. (2016). Tax revenue potential and effort – an empirical investigation.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

- Judisseno, R. K. (1997). *Perpajakan/Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementrian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nur, S. (2011). Analisis Kegiatan Penggalian Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Oleh Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Sadar Pajak. (2018, 05 31). *Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama*. Dipetik 04 23, 2022, dari Sadar Pajak: <https://sadarpajak.com/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi-kpp-pratama/>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.